

**HUBUNGAN PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN
DENGAN *EARNINGS MANAGEMENT*
(Studi pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)**

Makhdalena

*Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau
gelatik14@yahoo.co.id*

Abstract: The monetary crisis that occurred in 1997 and the collapse of the giant companies of the world in the early 2000s due to a manipulation of accounting (*earnings management*). Manipulation of accounting also happens to companies that listing on the Jakarta Stock Exchange. And this makes accounting experts to focus on an independent commissioner. The experts agree that the independent commissioner is an important issue related to earnings management through a substance that can be provided by an independent commissioner. Earnings management can be reduced if supported by an adequate proportion of independent commissioners. Based on such consideration, the researcher is interested in doing research that aims to determine the proportion of independent commissioners relationship with earnings management. Research done by the manufacturing survey at 48 listed companies in Jakarta Stock Exchange drawn at random from the population. The data used in this study is secondary data from the annual report. Data were analyzed using product moment analysis. The results showed that the proportion of independent commissioners have a positive relationship with earnings management, but not significant at the issuer's manufacturing in the Jakarta Stock Exchange.

Keywords: Board of Commissioners, Earnings Management, Corporate Governance

Abstrak: Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dan bangkrutnya perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000an disebabkan karena adanya manipulasi akuntansi (*earnings management*). Manipulasi akuntansi juga terjadi pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta. Dan ini membuat para pakar akuntansi memusatkan perhatian pada komisaris independen. Para pakar setuju bahwa komisaris independen merupakan isu penting yang berhubungan dengan *earnings management* melalui substansi yang dapat diberikan oleh komisaris independen. *Earnings management* dapat dikurangi apabila didukung oleh proporsi komisaris independen yang memadai. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan proporsi komisaris independen dengan *earnings management*. Penelitian dilakukan dengan cara survei pada 48 emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta yang diambil secara random dari populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari *annual report*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis *product moment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki hubungan positif dengan *earnings management* tetapi tidak signifikan pada emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta.

Kata Kunci: Dewan Komisaris, *Earnings Management*, *Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000 seperti Peregrine Investment Holding di Hongkong, Baring Futures di Singapore, Enron Corporation di Amerika Serikat, dan HIH Insurance Company Ltd di Australia, maka perhatian dunia terhadap *corporate governance* mulai meningkat. Bangkrutnya perusahaan raksasa dunia di awal tahun 2000an disebabkan karena adanya manipulasi akuntansi (*earnings management*) yang telah merugikan pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan perusahaan diberbagai Negara. *Earnings management* juga terjadi di Bursa Efek Jakarta, seperti kasus PT Indofarma (Bapepam, 2004). Kasus Kimia Farma Tbk (Bapepam, 2002) dan kasus PT Davomas Abadi Tbk (Bapepam, 2004).

Earnings management timbul karena laba akuntansi dapat dijadikan sebagai indikator kinerja manajer (Scott, 2006), sehingga pusat perhatian investor lebih pada informasi laba tersebut tanpa memperhatikan prosedur, metode dan pertimbangan (*judgment*) yang digunakan manajer perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Karena laba menjadi pusat perhatian para investor, maka ini mendorong manajer untuk mengatur laba yang dilaporkan dengan kata lain melakukan *earnings management*. *Earnings management* juga dapat diakibatkan karena adanya *agency problem* antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agent* adalah individu yang *self interested*, maka ada alasan untuk percaya bahwa *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal*.

Agency problem yang ada antara *agent* dengan *principal*, ini akan menimbulkan biaya yang disebut juga dengan *agency cost*. *Agency cost* adalah pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan baik yang ditanggung oleh *principal* maupun yang ditanggung oleh *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency cost* meliputi: 1) biaya *monitoring*; 2) biaya *bonding*; dan 3) *residual loss*. Biaya *monitoring* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk membatasi aktivitas-aktivitas *agent* yang menyimpang dari yang diharapkan oleh *principal*. Biaya *bonding* adalah biaya untuk mengikat *agent*. Dan terakhir adalah biaya *residual loss*, yaitu merupakan pengorbanan berupa berkurangnya kemakmuran *principal* yang timbul akibat dari perbedaan antara keputusan *agent* dengan keputusan *principal*.

Agent (manajemen) bertanggungjawab kepada *principal* (pemegang saham). Dan alat pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*, ini berbentuk laporan yang biasanya disebut juga dengan pelaporan keuangan. Manajemen merupakan satu-satunya pihak yang memiliki akses langsung dengan perusahaan. Jadi dengan demikian, maka asimetri informasi akan terjadi. Sebagai individu yang *self interested*, manajemen (*agent*) akan selalu berusaha meningkatkan kemakmurannya tanpa memperhatikan kemakmuran *principal*. *Agent* akan selalu berusaha untuk menampilkan laporan yang menarik dan selalu berusaha mengelabui *principal* agar perilakunya yang telah merugikan *principal* akibat dari *self interested* tidak dapat diketahui oleh *principal*. Perilaku *agent* untuk mengelabui *principal* dengan cara menampilkan pelaporan keuangan yang menarik, ini dapat dilakukan dengan meratakan, menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan yang diinginkannya. Hal ini biasanya disebut juga dengan *earnings management*. *Earnings management* ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi *earnings management* dapat menyesatkan para pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan investor terhadap pasar modal dapat menurun akibat adanya *earnings management*. Jadi untuk mengantisipasi timbulnya *earnings management*, maka dikeluarkanlah peraturan, yaitu Peraturan Pencatatan Nomor 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 315/BEJ/06/2000.

Analisis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama tragedi bisnis adalah karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan. Dan Salah satu struktur dari *corporate governance* adalah dewan komisaris.

Menurut Stephen, Owen dan Solomon dalam Aldrige (2005), bangkrutnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia salah satunya disebabkan karena tidak berfungsinya dewan komisaris sebagai mana mestinya. Dewan komisaris tidak dapat mengawasi perilaku manajemen dalam operasional perusahaan, sehingga manajemen bebas melakukan apa saja yang mereka mau termasuk memanipulasi laporan keuangan (*earnings management*) karena ingin menutupi kinerja manajemen yang buruk. Hal ini mengakibatkan kepercayaan investor atas pasar modal menurun. Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka dapat diambil pelajaran bahwa betapa pentingnya keberadaan komisaris independent dalam pengelolaan perusahaan.

Model *good corporate governance* sudah mewajibkan adanya keberadaan komisaris independen. Seiring dengan makin meningkatnya kompleksitas dan tantangan perusahaan, komisaris yang berasal dari dalam perusahaan sekarang memiliki banyak kekurangan tidak saja karena faktor rendahnya derajat independensinya tetapi juga didorong oleh faktor keterbatasan kualitas individu komisaris internal, seperti: *lack of skill, knowledge, and information* (Syakhroza, 2004). Keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh komisaris yang berasal dari dalam perusahaan.

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimum 30% dari jumlah anggota komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *monitoring* karena komisaris independen sangat efektif untuk meminimalisasi masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*), karena keberadaan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan OECD (2004) yang menyatakan bahwa fungsi kunci dewan komisaris antara lain adalah meyakini integritas akuntansi dan system pelaporan keuangan korporasi. Oleh karena itu, maka untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman masalah keuangan perusahaan yang termasuk membaca laporan keuangan (Moenaf, 2000). Menurut Xie *et al* (2001), latar belakang keuangan dari anggota dewan komisaris dapat menghambat *earnings management*.

Dewan komisaris dapat berfungsi jika memiliki komposisi yang ideal, yaitu yang terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang diberi istilah dengan Komisaris Independen (Chtourou *et al*, 2001) yang jumlahnya memadai yang menurut

Bapepam (2000) adalah sebanding dengan kepemilikan saham minoritas atau minimal 30% dari jumlah dewan komisaris. Bukti-bukti penelitian empiris yang ada saat ini mendukung prediksi bahwa kemampuan komisaris independen untuk memonitor merupakan fungsi positif dari proporsi dan independensi *outside directors* (Weisbach, 1988). Jadi dengan adanya proporsi komisaris independen yang lebih besar diharapkan dapat memonitor perilaku manajemen yang dapat merugikan pemegang saham.

Dechow *et al.* (1996) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi subyek tindakan pelaksanaan akuntansi oleh *Security of Exchange Commission* (SEC) karena diduga keras melakukan pelanggaran terhadap GAAP sehingga laba yang dilaporkan dinyatakan lebih (*overstatement*). Mereka menemukan bukti bahwa struktur *corporate governance* memainkan peran penting dalam membatasi *earnings management* dan secara spesifik mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran ini memiliki *board of director* yang anggotanya didominasi oleh *inside board of directors*. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa terdapat hubungan negatif antara komposisi *outside directors* dengan kasus ekstrim dalam *earnings management*.

Selanjutnya Beasley (1996) menguji hubungan antara *board of directors* perusahaan dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Beasley menemukan adanya hubungan negatif antara persentase anggota non-eksekutif dalam *board of directors* dan kemungkinan kecurangan dengan membandingkan antara perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Klein (2002) yang menguji hubungan antara *earnings management* dengan karakteristik *board of directors* menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi *board of directors* dengan *earnings management* yang diukur dengan *abnormal accruals*.

Penelitian yang dilakukan oleh Peasnell *et al* (2000) menunjukkan bahwa proporsi *outside director* berpengaruh negatif terhadap *earnings management* yang diukur dengan *working capital accruals*.

Selanjutnya Beasley (1996) menyatakan peran dewan juga mempunyai pengaruh penting pada kualitas pelaporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh Chtourou *et al* (2001) yang menemukan bukti bahwa peran dewan berhubungan negatif dengan *abnormal accrual*. Penelitian Klein (2002), juga telah membuktikan bahwa struktur dewan yang lebih independen dari CEO lebih efektif memonitoring proses pelaporan keuangan perusahaan. Peasnell *et al* (2004) menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, dewan komisaris merupakan bagian yang penting dari proses pelaporan keuangan.

Timbulnya *earnings management* pada perusahaan-perusahaan di UK tergantung pada monitoring dewan. Peasnell *et al* menemukan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi *outsider director* tinggi berhubungan dengan menurunnya *income-increasing (earnings management)*.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Proporsi Komisaris Independen berhubungan dengan *Earnings Management*.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Proporsi Komisaris Independen berhubungan dengan *Earnings Management*.

METODE

Objek penelitian ini adalah proporsi komisaris independen (X) dan *earnings management* (Y). Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan bisnis dengan perusahaan, yang biasanya disebut dengan istilah komisaris independen (Mas Achmad, 2005) yang jumlahnya sesuai dengan aturan BEJ, yaitu minimal 30% dari jumlah dewan komisaris atau sama dengan persentase jumlah pemegang saham minoritas. *Earnings management* adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu (Scott, 2006), yang diproksikan dengan *discretionary accrual* (DTAC) dihitung menggunakan *Modified Jones' Model* (Dechow, 1995).

Operasionalisasi Variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Proporsi komisaris Independen (X) dan variabel dependennya adalah *earnings management* (Y). Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasionalisasi dan indikator variabel penelitiannya sebagai berikut:

Proporsi Komisaris Independen (X). Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan bisnis dengan perusahaan, yang biasanya disebut dengan komisaris independen (Mas Achmad, 2005) yang jumlahnya sesuai dengan aturan BEJ, yaitu sama dengan persentase jumlah pemegang saham *minority* atau minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Informasi mengenai proporsi komisaris independen diperoleh dari pelaporan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan.

***Earnings Management* (Y).** *Earnings management* adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu (Scott, 2000), yang diproksikan dengan *discretionary accrual* (DTAC) dihitung menggunakan *Modified Jones' Model* (Dechow, 1995). Untuk mengukur tingkat *earnings management* menggunakan *total accrual* (TAC) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary accrual* (DTAC) dan *non discretionary accrual* (NDTAC). *Non discretionary accrual* merupakan komponen *accrual* yang terjadi secara alami, sedangkan *discretionary accrual* merupakan komponen *accrual* yang berasal dari *earnings management* yang dilakukan manajer perusahaan.

Untuk mendapat nilai *discretionary accrual* (DTAC) maka langkah pertama adalah mencari nilai *total accrual* (TAC) dengan rumus:

Total accrual (TAC) = laba bersih (*net income*) - arus kas operasi (*cash flow from operation*)

Selanjutnya menghitung *total accrual* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS yaitu: $TAC_{i,t}/TA_{i,t-1} = \alpha_1(1/TA_{i,t-1}) + \alpha_2[(\Delta REV - \Delta REC)]/TA_{i,t-1} + \alpha_3(PPE_{i,t}/TA_{i,t-1}) + \varepsilon_t$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) maka dihitung nilai *non discretionary accrual* (NDTAC) dengan rumus:

$NDTAC = \hat{\alpha}_1(1/TA_{i,t-1}) + \hat{\alpha}_2[(\Delta REV - \Delta REC)]/TA_{i,t-1} + \hat{\alpha}_3(PPE_{i,t}/TA_{i,t-1})$

DTAC merupakan residual yang diperoleh dari estimasi *total accrual* yang dihitung sebagai berikut:

$$DTAC_t = TAC_t/TA_{t-1} - NDTAC$$

Keterangan: TAC_t adalah *Total Accrual*; $DTAC$ adalah *Discretionary accrual*; $NDTAC$ adalah *Non discretionary accrual*; $TA_{i, t-1}$ adalah *Total Asset* perusahaan periode t-1; ΔREV adalah Perubahan pendapatan bersih dalam periode t; ΔREC adalah Perubahan piutang bersih dalam periode t; PPE_t adalah *gross Property Plant and equipment* pada tahun t; e_i adalah *errors*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *discretionary accruals* sebagai proksi *earnings management* merupakan *error term*.

Data yang digunakan untuk menghitung nilai variabel *earnings management* adalah data silang tempat atau cross sectional untuk setiap sample yang diperoleh dari pelaporan tahunan (*annual report*). Adapun secara rinci operasionalisasi variabel penelitian ini adalah:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Proporsi Komisaris Independen (X)	Wakil dari pemegang saham minoritas yang bertanggung jawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan perusahaan (Moenaf, 2000).	Jumlah keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan (<i>outside directors</i>) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan, minimal 30% atau sebanding dengan kepemilikan saham minoritas (BEJ, 2000).	Rasio
<i>Earnings Management</i> (Y)	intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan cara memanipulasi laba secara aktif guna mencapai tingkat laba tertentu yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan tertentu.	Nilai <i>Discretionary Accruals</i> dihitung dengan <i>Modified Jones' Model</i> (Dechow, 1995) sebagai berikut: $DTAC_t = TAC_t/TA_{t-1} - NDTAC$	Rasio

Populasi dan Sampel Penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar (emiten) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut: (1) Emiten yang masuk dalam sektor industri manufaktur. Hal ini ditetapkan adalah karena perusahaan-perusahaan di luar sektor ini memiliki regulasi tersendiri yang dapat mempengaruhi karakteristik laporan keuangan, terutama dalam hal perhitungan *accrual*.; (2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2004-2005.; (3) Perusahaan memiliki data mengenai komisaris independent dan *earnings management*.

Menurut *Indonesian Capital Market Directory* 2005 yang dikeluarkan oleh *Institute for Economic and Financial Research* (ECFIN) jumlah emiten yang terdaftar di BEJ tahun 2005 sebanyak 330 perusahaan sedangkan jumlah emiten manufaktur adalah sebanyak 150 perusahaan atau 45,45%, disusul oleh *Banking, Credits Agencies Other, Securities, Insurance and Real Estate* sebanyak 98 emiten atau 29,07%.

Alasan diambilnya perusahaan yang *listed* di BEJ sebagai populasi adalah karena perusahaan yang *listed* di BEJ lebih banyak menghimpun dana dari masyarakat sehingga perlu diawasi. Sedangkan alasan diambilnya sektor manufaktur adalah karena sektor manufaktur adalah perusahaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu

perlu pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan dapat bertahan demi keamanan dana masyarakat dan menghindari pengangguran. Penelitian ini menggunakan sampel dalam menggeneralisir kesimpulan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan teknik iterasi (Nirwana SK Sitepu, 1994) dengan jumlah sampel sebanyak 48 perusahaan (nama sampel terlampir).

Data yang berhubungan dengan variabel proporsi komisaris independen, dan *earnings management* diperoleh dari pelaporan tahunan (*annual report*) emiten manufaktur tahun 2004 dan 2005. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan telah diserahkan ke Bapepam dan Bursa Efek Jakarta. Dipilih tahun 2005 sebagai tahun pengamatan adalah karena pada saat dilakukan pengumpulan data, data terakhir yang tersedia adalah data tahun 2005. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *product moment* dengan menggunakan paket program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Proporsi Komisaris Independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan persentase keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan darah dan hubungan bisnis dengan perusahaan dari masing-masing emiten yang sesuai dengan peraturan Bursa Efek Jakarta, yaitu sebanding dengan kepemilikan saham minoritas atau minimal 30% dari total anggota dewan komisaris.

Tabel 2. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen	Jumlah	Persentase
Rata-Rata	41,35%	-
Dibawah rata-rata	31 perusahaan	64,58%
Diatas rata-rata	17 perusahaan	35,42%

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi komisaris independen pada 48 perusahaan yang jadi sampel sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pengelola pasar modal, yaitu 30%. Sementara jumlah perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen di bawah rata-rata sampel ada sebanyak 31 perusahaan (64,58% dari total sampel), kemudian sisanya memiliki proporsi komisaris independen di atas rata-rata sampel yaitu sebanyak 17 perusahaan (35,42% dari total sampel). Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang diambil sebagai sampel semuanya telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BEJ, yaitu menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi BEJ No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Jadi dengan demikian dari data yang diperoleh, berarti emiten manufaktur BEJ yang diambil sebagai sampel telah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ.

Analisis Deskriptif Variabel *Earnings Management*. *Earnings management* merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal yang diprosikan dengan *discretionary accrual* yang dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow, 1995).

Tabel 3. Indeks *Earnings Management*

Indeks <i>EarningsManagement</i>	Jumlah	Persentase
Rata-Rata	0,0774	-
Dibawah rata-rata	28 perusahaan	58,33%
Diatas rata-rata	20 perusahaan	41,67%

Sumber: Data Sekunder [Diolah]

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata indeks *earnings management* pada 48 emiten yang jadi sampel yaitu sebesar 0,0774 artinya dari 48 perusahaan yang jadi sampel mayoritas di antaranya dapat dikatakan melakukan *earnings management*. Sementara jumlah perusahaan yang memiliki nilai indeks *earnings management* di bawah rata-rata sampel, yaitu yang *earnings managementnya* di bawah 0,0774 ada sebanyak 28 perusahaan (58,33% dari total sampel), kemudian sisanya memiliki nilai indeks *earnings management* di atas rata-rata sample, yaitu diatas 0,0774 ada 20 perusahaan (41,67%). Emiten manufktur di BEJ yang menjadi sampel semuanya masih melakukan *earnings management* tetapi sebagian besar, yaitu 28 perusahaan (58,33%) sampel, *earnings mangementnya* telah di bawah rata-rata yang berarti perusahaan telah menuju keperbaikan kualitas laporan keuangan, yaitu nilai komponen *earnings management* semakin mendekati nol. Hal ini bertanda bahwa kualitas laporan keuangannya semakin membaik. Keandalan laporan keuangan dapat diukur dengan keberadaan *earnings management* (Han Sam, 2005), yaitu semakin mendekati nol komponen *earnings management*, maka kualitas laporan keuangan semakin membaik. *Earnings management* merupakan komponen dari *discretionary accrual*, yaitu komponen *accrual* yang sengaja dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi semakin mendekati nol komponen *earnings management* berarti semakin kecil *discretionary accual* yang dilakukan oleh manajemen yang berarti semakin membaik kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *product moment* diperoleh keterangan bahwa Proporsi Komisaris Indipenden memiliki hubungan positif dengan *earnings management* tetapi tidak signifikan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta ($p\text{-value} = 0.559 > 0.05$). Proporsi komisaris independen tidak terbukti berhubungan dengan *earnings management* secara signifikan, hal ini tidak mendukung penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan negatif terhadap *earnings management* (Bearley,1996; Peasnell *et al*, 2001; Chtourou, 2001; Xie, 2001).

Analisis Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan *Earnings Managemen*. Seperti digambarkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan *Earnings Management*

		Correlations	
		Proporsi Komisaris Independen	<i>Earnings Management</i>
Proporsi Komisaris Independen	Pearson Correlation	1	.086
	Sig. (2-tailed)		.559
	N	48	48
<i>Earnings Managementt</i>	Pearson Correlation	.086	1
	Sig. (2-tailed)	.559	
	N	48	48

Proporsi komisaris independen tidak berhubungan secara signifikan terhadap *earnings management*, hal ini disebabkan karena:

- a. Proporsi komisaris independen terlalu sedikit dibandingkan dengan dewan komisaris, yaitu hanya 30%. Kecilnya proporsi komisaris independen tersebut belum cukup untuk mengimbangi suara dewan komisaris dalam hal menetapkan suatu kebijakan penting perusahaan apabila terjadi pertentangan antara dewan komisaris dengan komisaris independen yang jumlahnya minoritas. Menurut Lorsch (2000), sebaiknya jumlah anggota dewan komisaris lebih banyak anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dari pada anggota dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan.
- b. Komisaris independen kebanyakan tidak ahli akuntansi dan keuangan, hal ini dapat dilihat dari komposisi komisaris pada *annual report*. Karena komisaris independen kebanyakan bukan ahli keuangan dan akuntansi, maka dengan demikian komisaris independen susah mendeteksi adanya *earnings management* karena untuk mengetahui *earnings management* diperlukan keahlian dalam akuntansi dan keuangan. Menurut Moenaf (2000), dewan komisaris harus terdiri dari berbagai bidang dan diantaranya harus ada bidang akuntansi dan keuangan karena menurut OECD (2004) fungsi kunci dewan komisaris antara lain adalah meyakini integritas akuntansi dan sistim pelaporan keuangan korporasi.
- c. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bukan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai *stakeholders* lainnya, tetapi hanya untuk pemenuhan regulasi saja (Mohamad Nur Sodiq dalam KNKCG, 2002) dan bukan untuk menegakkan *corporate governance*. I Nyoman dkk (2003) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajemen dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya I Nyoman dkk (2003) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor yang berdampak terhadap harga saham yang mana investor merani membayar premium atas harga saham yang memiliki *good corporate governance* dan akhirnya perusahaan dapat dengan mudah memperoleh modal dengan penurunan biaya modal. Menurut Tjuk Kasturi dalam Antonius dan Subarto (2004), hasil penelitian yang dilakukan di dunia maupun di ASEAN termasuk Indonesia, jika komisaris independen berfungsi dengan baik dan selalu mencoba untuk memaksimalkan fungsinya, maka

perusahaan akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari publik sehingga publik memberikan bonus pada harga saham sampai dengan 20%.

- d. Komisaris independen diangkat berdasarkan atas kedekatan hubungan bukan berdasarkan atas kemampuan dan keahlian akibatnya komisaris independen tidak dapat bekerja secara profesional dan independensinya juga diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas ataupun hubungannya dengan manajemen (Herwidayatmo dalam FCGI, 2001). Menurut Moenaf (2000) dan FCGI (2001), agar komisaris independen dapat berfungsi dengan semestinya, maka komisaris harus memiliki kompetensi, harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman masalah bisnis perusahaan, keuangan dan akuntansi. Hal ini wajib agar komisaris dapat mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar yang terjadi dalam perusahaan dan independensinya harus benar-benar terjaga.

PENUTUP

Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan dari penelitian ini adalah bahwa proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan *earnings management* tetapi tidak berhubungan secara signifikan dengan *earnings mangement* pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Artinya bahwa proporsi komisaris independen pada emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta tidak dapat mempengaruhi besaran *earnings management* yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Artinya komisaris independen tidak dapat bekerja sebagai mekanisme *corporate governance* yang berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen yang berbentuk *earnings management*. Hal ini disebabkan karena komisaris independen tidak ahli dalam bidang keuangan dan dalam bidang akuntansi serta jumlahnya juga tidak memadai hanya 30% dari total dewan komisaris dan akibatnya tidak dapat mempengaruhi besaran *earnings management* yang ada pada emiten manufaktur di BEJ.

Saran. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan untuk lebih mendorong dan membangun praktik *corporate governance*, diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Saran Pengembangan Ilmu

- a. Bagi peneliti lain. Peneliti selanjutnya bisa mengidentifikasi pada perkiraan mana sajakah perusahaan lebih sering melakukan *earnings management* sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada calon investor atau investor dalam menganalisa laporan keuangan dengan lebih memperhatikan perkiraan-perkiraan yang sering dilakukan oleh manajemen untuk melakukan *earnings management*.
- b. Bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengajaran materi manajemen keuangan dan akuntansi keuangan dengan memasukkan materi tentang *earnings management* yang lebih detail. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi dan menyempurnakan mutu kurikulum bidang akuntansi dengan menambahkan mata kuliah *Corporate Governance*.

Saran Operasional

- a. Bagi Regulator. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang *earnings management* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga regulator dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat

meminimalisasi keberadaan *earnings management* pada laporan keuangan perusahaan.

Bagi regulator, disarankan agar dalam penetapan proporsi komisaris independen sebaiknya jumlahnya lebih dari lima puluh persen bukan sebesar 30% yang telah ditetapkan Bursa Efek Jakarta. Hal ini perlu untuk mengimbangi suara pada dewan komisaris yang mayoritas serta komisaris independen sebaiknya terdiri dari berbagai bidang terutama bidang akuntansi dan bidang keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan bagi perusahaan kesadaran akan pentingnya keberadaan komisaris independen yang jumlahnya memadai dan efektif. Karena hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Para investor akan mempercayai penanaman modalnya pada perusahaan yang memiliki komisaris independen yang efektif. Sebaiknya keberadaan komisaris independen jangan hanya sekedar untuk memenuhi regulasi, tetapi keberadaan komisaris independen adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam perusahaan. Jadi dalam penunjukkan komisaris independen harus berdasarkan atas kompetensi dan kapabilitas bukan berdasarkan atas kedekatan hubungan. Hal ini bertujuan agar komisaris independen dapat bekerja secara profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldrige E. John & Siswanto Sutojo, (2005). *Good Corporate Governance*. Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: Penerbit Damar Mulia.
- Beasley, Mark S., (1996). An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, vol. 17. (4), p. 421-452.
- Bursa Efek Jakarta, (2000). Peraturan Pencatatan Efek. Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. *Keputusan Direksi* {T BEJ No. 315/BEJ/062000.
- Chtourou, S. M., Jean Bedard dan Lucie Courteau, (2001). *Corporate Governance and Earnings Management*. *Working Paper*. Universite Laval, Quebec City, Canada. April.
- Dechow, P. M., Sloan & A. P. Sweeny, (1996). Causes and Consequences of Earnings Management Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by SEC. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 13, (1). pp1-36.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), (2001). *Corporate Governance*. Tata Kelola Perusahaan. Jilid 1 (Edisi ke-2).
- Jensen, M and W. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency cost, and Ownership structure, *Journal of Finance Economic*. Vol. 3, 305-360.
- Klein, (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal of accounting and Economics*, vol. 33. (3). August, pp. 375-400.
- Setiawati, L dan Ainun Na'im, (2002). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15, (4). pp: 424-441.
- Lorsch, (2000). Empowering the Board. *Harvard Business Review on Corporate Governance*. The Harvard Business Review.

- Regar, M. H., (2000). Dewan Komisaris: Peranannya sebagai Organ Perseroan. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD, (2004). OECD Principles of Corporate Governance, The OECD, Paris.
- Peasnell, K.V, P.F. Pope dan S. Young, (2000). Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?. *Accounting and Business Research* 30: 303-326.
- Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. International Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Syakhroza, Akhmad, (2004). Model Komisaris untuk Efektivitas GCG di Indonesia, *Majalah Usahawan*, No.05 th XXXIII Mei 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun (1995). Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1999.
- Watt, Ross L dan Jerold L. Zimmerman, (1986). Positive Accounting Theory, Prentice Hall, New Jarsey.
- Weisbach, M, (1988). Outside Directors and CEO Turnover. *Journal of Financial Economics*. Vol. 20: 431-460.
- Xie, Biao, Davidson, Wallace N. dan Dadalt, Peter.J, (2003). Earnings management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee. *Working Paper Series*: <http://ssm.com>